

Judul : DPR Khawatir Menurunnya Nilai-nilai Ideologi Kebangsaan
Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

DPR Khawatir Menurunnya Nilai-nilai Ideologi Kebangsaan

Jakarta, Pelita

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo menyatakan kekhawatirannya terhadap menurunnya rasa kebangsaan dan nilai-nilai ideologi Pancasila secara terus menerus di kalangan masyarakat Indonesia. Dia pun mengimbau agar seluruh elemen bangsa terus melakukan introspeksi dan waspada.

Bamsot demikian biasa dia disapa dalam sidang Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9) mengatakan penurunan itu terbukti atas hasil penelitian lembaga-lembaga riset yang sangat kredibel, yang menegaskan nilai-nilai ideologi dan kebangsaan berada dalam posisi bahaya.

Dia mencontohkan indeks Ketahanan Nasional yang disusun Labkurtanmas, Lembaga Ketahanan Nasional mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam kurun tujuh tahun terakhir mulai 2010 sampai 2016.

Indeks ketahanan ideologi meliputi variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan

hak kehidupan sosial, dan persatuan bangsa, terus merosot dari skors 2,31 (pada 2010) menjadi 2,06 (2016).

Gambaran serupa kata Bamsot dalam pidato dalam rangka HUT MPR RI ke-73 diperlihatkan hasil Survei Nilai-Nilai Kebangsaan (SNK) yang dilakukan oleh BPS tahun 2015 (survei pertama kali di Indonesia). Dari setiap 100 orang warga Indonesia, 18 orang tidak tahu judul lagu kebangsaan Indonesia, 53 persen orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan dan 24 dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila. Bahkan menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), trend pendu-

kung Pancasila menurun dalam setiap 5 tahun.

Tahun 2005 pendukung Pancasila sebesar 86 persen, tahun 2010 turun jadi 81,7 persen dan tahun 2015 turun lagi jadi 75,3 persen. "Ini sangat mengerikan. Kita tidak bisa main-main dengan angka-angka itu. Perbedaan tafsir dan persepsi terhadap hasil survei, itu hal biasa. Poin penting kita bukanlah di situ. Tapi, pesan terpenting di balik angka-angka itu," tegas Bamsot.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu pun mengingatkan agar kita harus waspada, sigap dan bergerak cepat mengantisipasi kemungkinan terburuk hilangnya nama negara bangsa Indonesia dari peredaran dunia. "Itu bukar mustahil akan terjadi. Jika semua lengah dan tidak serius membendung krisis nilai yang melahirkan gerakan anti kebangsaan dan Pancasila secara total,"

Ditegaskannya, jika saat ini kehidupan negeri ini diliputi kabut apatisme dan pesimisme, riuh kegaduhan dengan miskin solusi, banyak gerakan jalanan tanpa

kejelasan arah yang benar, rasa saling percaya lenyap dalam pergaulan, kebaikan dimusuhi dan kejahatan diagungkan, toleransi, keragaman, dan perbedaan dibenci; politik identitas kembali dirayakan, maka itu adalah akibat dari keterbelakangan di bidang pembangunan nilai.

Karena itu lanjut Bamsot, terasa penting untuk memperhatikan jalinan erat antara nilai-nilai budaya, kebangsaan, politik dan ekonomi, sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Lagu Indonesia Raya dengan jelas mengingatkan. "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya." Kedua sayap pembangunan itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bergerak serempak, selaras, dan seimbang," ujarnya.

Dibagian lain mantan wartawan itu menyatakan optimis DPR ke depan akan makin baik, meski masih banyak anggota DPR kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Karena itu secara kelemagaan, DPR selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

"DPR sudah memulai program parlemen modern sejak 2015 hingga sekarang. Sejumlah capaian telah berhasil dilalui, namun konektivitas DPR dengan masyarakat yang menjadi konstituen masih perlu ditingkatkan," ujar dia.

Karena itu lanjut dia lagi, DPR melakukan Inisiatif open parliament untuk memperkuat parlemen modern yang telah lama digagas DPR. Dengan open parliament, inisiatif kolaborasi dan partisipasi masyarakat di DPR semakin terbuka, pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan representasi masyarakat.

"Kehadiran DPR pada dua forum Global Legislative Openness Conference di Ukraina pada April 2017 dan Open Government Summit di Georgia pada Juli 2018 merupakan bentuk komitmen parlemen dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Karena itu, pada tahun 2018 ini, bertepatan dengan HUT ke-73, DPR meluncurkan Aplikasi DPR dalam Genggaman Rakyat," jelas dia. (kh)